

DEWAN KOTA

Tindaklanjuti Temuan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak akan berkoordinasi dengan Inspektorat setempat untuk menindaklanjuti hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar.

"Kami akan mempelajari dulu TLHP dan laporan hasil pemeriksaan semester II 2010. Nanti akan dievaluasi berdasarkan data yang ada," ujar Ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azas di



Hartono Azas

Pontianak. Perwakilan BPK RI Kalbar menyerahkan LHP Kinerja dan LHP dengan tujuan tertentu semester II tahun 2010 pada Pemkot Pontianak, bersama lima entitas lainnya, yakni Pemprov Kalbar, Pemkot Pontianak, Pemkab Sambas, Sanggau, Kubu Raya, dan Kayong Utara. Pemerintah yang telah menerima LHP dari BPK diharapkan adanya aksi nyata demi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masa mendatang.

Ke Halaman 23 kolom 1

Tindaklanjuti Temuan

Sambungan dari halaman 17

Menurut Hartono, pihaknya akan melakukan evaluasi berdasarkan saran BPK, yakni administrasi yang kurang lengkap akan diperbaiki, dan yang tidak sesuai aturan harus disetorkan kembali. Hasil rekomendasi tersebut juga akan dikaji dan ditelaah, setelah itu akan dilakukan rapat koordinasi

dengan Inspektorat Kota Pontianak. "Rekomendasi BPK ini juga akan menjadi bahan rapat kita," katanya.

Dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2009 terdapat kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Pontianak yang sifatnya rangkap, sehingga terjadi kelebihan pembayaran perjalanan

dinas sebesar Rp46,25 juta.

Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa penyediaan makan dan minum ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak tidak sesuai ketentuan standar biaya umum sebesar Rp45,4 juta dan realisasi belanja makan minum rapat komisi sebesar Rp249,45 juta, serta terdapat kelebihan pembayaran belanja sewa kendaraan yang

melebihi standar biaya umum sebesar Rp353,10 juta.

Hartono mengatakan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2009 yang menyangkut dewan sudah diperbaiki. "Perjalanan dinas yang waktu itu sudah diperbaiki administrasinya sesuai dengan rekomendasi dari BPK," katanya. (uni)